PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP3AKB)

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2026

DINSOSP3AKB

*"Melayani dengan Hati
Membangun Sanggau
yang Berdaya"*



Jl. Sutan Syahrir No. 54, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Pada prinsipnya Renja Perubahan merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap Renja Perubahan ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak an Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau "**Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera"**.

Sanggau, 28 Agustus 2026
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau,

Ginting, S.Si.Apt., M.K.M
Pembina Utama Muda/IVC
NIP 19690318 199703 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4. SISTEMATIKA RENJA PERUBAHAN 5

BAB II 6

EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026. 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 53

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 56

2.4. Review Terhadap Renja Perubahan RKPD 58

BAB III 87

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 87

BAB IV 141

P E N U T U P 141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diketahui bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja untuk tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah Ranhir Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan yang perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi target kinerja tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk tahun berikutnya. Dalam kenyataannya dokumen Renja haruslah seiring sejalan dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen referensi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen Renja mengacu pada dokumen Rencana Strategis begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja merupakan cikal bakal dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen Renja adalah acuan ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Renja idealnya juga disusun dengan kajian terhadap dokumen Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga serta dokumen Rencana Kerja Provinsi sehingga apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau linier dan memiliki kolerasi dengan program nasional dan program provinsi sehingga formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki sinergisitas sehingga memberikan ruang akselerasi implementasi kebijakan pembangunan berazaskan keadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Sanggau. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja berada pada posisi yang sangat penting bagi perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan

disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyusun dokumen Rencana Kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera.

Proses Penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Renstra Tahun 2025-2029 telah disusun sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Renja 2026 akan dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan untuk menyusun Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berfungsi sebagai koridor perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini memuat informasi tentang Sasaran, indikator kinerja, target pencapaian kinerja, kebutuhan Pagu indikatif dan sumber dana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Stándar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stándar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 diantaranya :

a. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
b. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
c. Menyajikan dokumen sebagai salah satu referensi dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA RENJA PERUBAHAN

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA Perubahan SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau Dengan Triwulan II Tahun 2026.
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan dalam bentuk rekomendasi. Dengan melakukan evaluasi akan ditemukan kekeuatan, kelemahan, peluang

dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang dalam hal ini terkait dengan target realisasi baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja perangkat daerah Dinsosp3akab.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2025-2029. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan serta hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memperoleh masukan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka memberikan masukan bagi proses dan tahapan kebijakan kedepan sehingga menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinsosp3akb. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun 2026 memuat 15 (Lima Belas) program dan 34 (tiga puluh Empat) dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Sub kegiatan. Total alokasi anggaran Dinsosp3akb pada tahun 2026 adalah sebesar Rp.15.066.884.053,05-. Dengan realisasi anggaran pada Bulan Juni Tahun 2026

sesebar 3.791.309.372,-. Atau sebesar 25,16% dari total anggaran keseluruhan. Dimana hal tersebut dikarenakan adanya Anggaran DAU SG pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Rp. 1.850.000.000,- yang belum mendapat dana Transfer dari pusat serta dikarenakan adanya perubahan Juknis DAK BOKB yang masih menunggu penginputan RUP.

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	15.066.884.053,05,-	15.066.884.053,05,-	3.791.309.372,-	25,16
TOTAL		15.066.884.053,05,-	15.066.884.053,05,-	3.791.309.372,-	25,16

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian PPKS

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (Enam) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Didukung dengan 8 (Delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada tabel:

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

Meningkatnya Kemandirian PPKS	**Indikator keluaran : Persentase PPKS yang mandiri**	**20,00%**		
	Program Pemberdayaan Sosial	**96,90 %**	**96,90%**	**100 %**
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	4 Lembaga	4 Lembaga	100 %
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	200 Orang	200 Orang	100%
	Program Rehabilitasi Sosial	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	2978 Orang	2978 orang	100%

	Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	628 Orang	628 Orang	100 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Penanganan Bencana	**100 %**	**100%**	**100%**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1200 orang	1200 orang	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100%

Indikator Kinerja Sasaran strategis 1 ini adalah :

- Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
- Tingkat Angka Kemiskinan

Sedangkan untuk indikator program pada sasaran 1 ini adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan. Realisasi capaian indikator program Pemberdayaan Sosial adalah 96,90%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dengan target kinerja 16 orang TKSK.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga sosial yang dibina dengan target kinerja 4 (empat) Lembaga sosial setiap tahunnya.

  Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator program yaitu Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina yang hanya memiliki satu kegiatan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Keluaran Jumlah Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan, sasaran kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten sanggau dengan target kinerja tahun 2024 sebanyak empat lembaga. Berkaitan dengan aspek pembinaan terhadap keberadaan kelembagaan sosial seperti Karang Taruna, Yayasan Sosial termasuk didalamnya juga sinergi pemberdayaan TAGANA. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 160 Karang Taruna dan 10 Yayasan Sosial di Kabupaten Sanggau.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

   Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, realisasi capaian indikator program ini adalah 100%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaiannya yaitu 100%. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase warga negara migran yang terfasilitasi. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang memiliki indikator keluaran yaitu jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/trafficking yang tertangani dengan target sebanyak 200 orang selama satu tahun, adapun yang menjadi sasaran kinerja yaitu pekerja eks migran dan

orang terlantar yang ada di Kabupaten Sanggau dan menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang yaitu Terpenuhinya jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/ Trafficking yang tertangani. Pada tahun 2024 kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial terealisasi sebesar 94,73%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program adalah persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terfasilitasi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 100% yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu penyediaan permakanan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta pemberian layanan rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- Penyediaan Permakanan

  Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial. Lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial adalah lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan dan kehidupannya berada pada garis kemiskinan. Lanjut usia terlantar ini mendapat kan bantuan langsung yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat meringankan kehidupan lansia tersebut. Untuk target kinerja Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar memiliki target sebanyak 535 orang lanjut usia terlantar. Dengan indikator hasil dari kegiatan adalah Terpenuhinya jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh kebutuhan dasar dengan target 100%.

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat.

  Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial memiliki sasaran kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 245 orang untuk tahun 2024, berupa bantuan dana yang bersifat stimulan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan dasar. Bantuan sosial yang diberikan 1 (satu) kali pertahun sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000) serta bantuan sembako sejumlah 100 paket bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibantu Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab di tiap kecamatan berjumlah 15 orang.

- Pemberian Layanan Rujukan

  Dengan indikator sub kegiatan yaitu 186 orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan di fasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis secara langsung di Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang dengan bantuan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang sudah tertangani dengan indikator hasil Terpenuhinya orang dengan gangguan jiwa yang ditangani. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan kemudahan pada orang dengan gangguan jiwa yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat dapat difasilitasi hingga kembali pulih. Fasilitasi yang diberikan berupa melengkapi dokumen kependudukan serta syarat lainnya dalam rangka mengusulkan ODGJ mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI –ABPD, hingga fasilitasi ODGJ mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan hingga resosialisasi ODGJ layak pulang ke keluarga.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program adalah Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan target kinerja 90% dengan realisasi capaian program sebesar 90% yang berarti terpenuhinya semua target capaian pada 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan satu sub kegiatan yaitu Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dengan target indikator

kinerja 9 Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun dengan target 2 Dokumen dalam satu tahun.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Tersedianya Data Kemiskinan Kabupaten Sanggau dengan sasaran kegiatan yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 125.412 Penduduk Miskin (data ini bersifat fluktuatif tergantung hasil verifikasi dan validasi data DTKS melalui aplikasi SIK-NG. Pendataan penduduk miskin merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan data ini akan menjadi tolak ukut untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah serta titik tolak untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.

  Kegiatan pendataan penduduk miskin akan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan. Untuk itu, maka telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3AKB dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sanggau. Untuk pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin, juga bersinergi dengan pihak desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan data penduduk miskin. Langkah yang sudah diambil adalah dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa untuk membiayai Honorarium Petugas Operator Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data melalui program SIK-NG. Data kemiskinan harus selalu diupdate agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat penerima.
- Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau dituangkan dalam Aplikasi SIDOMPU, dengan adanya aplikasi SIDOMPU memberikan kemudahan dalam hal memverifikasi data kependudukan melalui nomor induk kependudukan sehingga hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtreraan Keluarga

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja 5 Jenis Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu Bantuan Kube, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sarana Lingkungan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan.

- Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini memiliki sasaran Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2024 berjumlah 7.901 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan mempunyai Sumber Daya Manusia yang disebut pendamping PKH di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertugas mendampingi KPM PKH. Program Keluarga Harapan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat karena bantuan diterima oleh KPM melalui transfer yang dikirim ke masing-masing rekening KPM PKH. Adapun yang menjadi indikator keluaran kegiatan Program Keluarga Harapan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat serta yang menjadi Indikator Hasil adalah Terpenuhinya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan. Besarnya bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak sama dikarenakan setiap keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang berbeda.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki indikator program yaitu Persentase Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani. Untuk tahun 2024 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ditarget kan sebanyak 23,05 % selama setahun. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehabilitasi Sosial yang memiliki sasaran kinerja Rumah Tidak Layak Huni dan yang menjadi indikator hasil adalah Terpenuhinya Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan stimulant Bahan Bangunan Rumah. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten

Sanggau. Kegiatan RTLH disinergikan dengan Nilai DOMPU yang merupakan nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sanggau. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni DOMPU dilaksanakan dengan asas gotong royong dan kerjasama antar semua pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau hanya memberikan bantuan stimulant berupa bahan bangunan kepada masyarakat miskin, sedangkan untuk pekerjaannya diharapkan adanya bantuan dari masyarakat dilokasi RTLH DOMPU dilaksanakan. Program RTLH telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan untuk Tahun 2023 jumlah RTLH DOMPU dilaksanakan untuk 46 RTLH dan ditambah 1 RTLH bekerjasama dengan TNI (lokasi Desa Semanget Kecamatan Entikong). Sampai dengan Tahun 2019 jumlah proposal pengajuan bantuan RTLH sebanyak 1.167 buah dan untuk tahun 2020 yang dapat ditampung sebanyak 46 buah. Program RTLH ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2024 total RTLH yang sudah teralisasi sebanyak 534 RTLH.

- ❖ Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam satu tahun anggaran. Dengan indikator anggaran Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan.

5. Program Penanganan Bencana

   Penanggulangan korban bencana memiliki sasaran kegiatan yaitu Korban bencana yang mana indikator keluaran kegiatan tersebut adalah jumlah Penerima Bantuan Bencana serta indikator Hasilnya berupa Terpenuhinya jumlah penerima bantuan Bencana yang ditangani yang memiliki target kegiatan sebanyak 300 korban bencana selama setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor serta bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban korban yang tertimpa musibah.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawana memiliki sasaran kegiatan Taman Makam Pahlawana yang memilliki target kinerja selama setahun adalah Tiga Taman Makam Pahlawan yang dipeliharan. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawanan ini juga diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Ada 3 TMP yang harus dipelihara di Kabupaten Sanggau yaitu TMP Patriot Bangsa, TMP Pangsuma Meliau dan TMP Temenggung Gergaji Sekayam. Kegiatan ini perlu dukungan pembiayaan agar TMP tidak lagi dianggap lokasi yang kurang baik namun diarahkan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Sasaran 2 memiliki inkator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), ditunjang dengan 2 (dua) Program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Perlindungan Khusus Anak dikdukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemberdayaan Perempuan. Berikut capaian Kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	**Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**61,65**	**61,65**	**100%**
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	100%
	Program Perlindungan Perempuan	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup	3 Perangkat Dearah	3 Perangkat Dearah	100%

	daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	25 Kasus	25 Kasus	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Dari sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan sasaran strategis kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2025-2026. Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks pembangunan Gender yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender memiliki Lima program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian program Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun dengan target indikator program 100%. Yang didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Dokumen Indikator Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan indikator Hasil adalah Terpenuhinya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau akan mengikuti kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dan berhasil mendapatkan predikat dengan kategori Pratama. Untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut ada tujuh syarat Perencanaan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG) dalam melaksanakan PUG. Adapun ketujuh prasyarat tersebut adalah :

No.	Komponen	Pelaksanaan
1.	Komitmen	Pejabatpengambil keputusan (peraturan tentang pelaksanaan PUG Pusat dan Daerah)
2.	Kebijakan	Adanya RPJMN/RPJMD yang responsive Gender
		Renstra Kementerian/Renstra Eselon 1/SKPD/OPD, Juklak, Juknis.
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Adanya Pokja PUG (termasuk 6 Focal Point PUG)
		Adanya rencana tahunan Pokja PUG
		Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG
4.	a. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan (capacity buiding PUG/PPRG
		Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT Fasilitator PUG/PPRG.
	b. Sumber Daya Anggaran	Adanya alokasi anggaran untuk (capacity buiding) PUG/PPRG
		Adanya ARG
5.	Alat Analisis Gender	Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard, dll)
6.	Data Gender	Tersedianya Statis gender/Profil gender/data terpilah.
7.	Peran serta masyarakat	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

Untuk mendapat kan Anugrah Parahita Ekaparaya, maka ketujuh komponen tersebut harus terpenuhi.

pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 61,35 % sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengn target 80,55 %. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan memiliki 6 kegiatan untuk menunjang target capaian kinerja diatas. Indeks pembangunan Gender atau biasa yang dikenal dengan IPG adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG, semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki enam kegiatan guna menunjang pertumbuhan IPG dan IDG.

pembinaan organisasi perempuan memiliki sasaran kinerja yaitu Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan target kinerja sebanyak 40 Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapaun yang menjadi indikator keluaran darin kegiatan tersebut adalah jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan dan yang menjadi indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan pembinaan organiasi perempuan adalah

a. Meningkatnya komitmen organisasi perempuan dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas penguatan kelembagaan dan jejaring untuk optimalisasi pelaksanaan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sanggau.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah menggugah partisipasi perempuan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan.

2. Program Perlindungan Perempuan

   Program perlindungan Perempuan memiliki indicator program yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dengan target kinerja program sebesar 100%. Program tersebut memilki tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan satu sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota; kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota didukung satu sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meminimalisir dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan terlindungi dan mendapat pendampingan hukum.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Dari sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Predikat Kabupaten / Kota Layak anak dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah Madya sebanyak 701 point, Dimana penilaian ini setiap tahunnya melibatkan OPD terkait serta sekolah dalam penilaian Predikat tersebut dan akan di nilai langsung oleh kemeterian PPPA dalam memberikan predikat kepada Kabupaten/Kota. Sasaran meningkatnya pemenuhan haka nak di dukung oleh 4 (Empat) Program yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Data Gender, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari program tersenbut adalah sebagai berikut:

	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**100 %**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100 %**	**100%**	**100%**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pengumpulan, pengolahan	1 Dok	1 Dok	100%

	analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**70 %**	**70 %**	**100 %**
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	33 Lembaga	33 Lembaga	100%
	Program Perlindungan Khusus Anak	**100%**	**100%**	**100%**
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup	2 Dok	2 Dok	100%

	daerah Kabupaten/Kota			
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dok	2 Dok	100%

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

   Program Peningkatan Kualitas Keluarga memiliki indikator yaitu Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar dengan di dukung oleh 2 kegiatan Dimana setiap kegiatannya memiliki satu sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

   Program Pengelolaan Data Gender dan Anak memiliki indicator program yaitu Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik yang didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota. Dan satu sub kegiatan yaitu Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota, dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh 2 (dua) sub

kegiatan yaitu Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator Program yaitu Persentase kasus kekerasan anak tertangani yang didukung oleh dua kegiatan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

   Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak dengan sasaran kegiatan kepala desa, kepala dusun, Tokoh Masyarakat, Guru, PKK Desa dan anak-anak. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak ini bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk tahun 2026 ada tujun desa yang menjadi target kinerja kegiatan, dengan capaian kinerja sebanyak 83,03 %. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak bertsentuhan langsung pada anak korban kekerasan atau pencabulan, sehingga anak korban kekerasan atau pencabulan mendapat perlindungan hukum yang langsung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau hingga

proses hukumnya selesai. Indicator keluaran dari kegitan tersebut adalah jumlah peserta sosialisasi terkait perlindungan anak dengan indikator hasil Terpenuhinya Desa yang telah berkomitmen layak anak.

Sasaran Strategis 4	**:**	**Meningkatnya Keberhasilan Ber KB**

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	**Indikator : Total Fertility Rate**	**2.21**	**2.21**	**100%**
	Program Pengendalian Penduduk	**2.22 Point**	**2.22 Point**	**100 %**
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3 Dok	3 Dok	100%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Pembinaan	**71,23 %**	**65,00 %**	**91,25 %**

	Keluarga Berencana (KB)			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	6 Dok	6 Dok	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 Orang	15 Orang	100%
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 Faskes	33 Faskes	100%
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan	4 Dok	4 Dok	100%

	pembinaan kesertaan ber KB			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**71,04 %**	**61,23 %**	**86,19 %**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lap	1 Lap	100%

Dari sasaran strategis meningkatnya penduduk yang ber KB memiliki sasaran indikator yaitu Total Fertility Rate dengan target 2,24 pertahun. pada sasaran strategis ini memiliki empat program dan memiliki delapan kegiatan untuk menunjang guna tercapainya Total Fertility Rate. Total Fertility rate ialah istilah yang digunakan dibidang Demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita sepanajng hidupnya

bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang reproduktifnya. Untuk target sasaran pada indikator sasaran strategis Total Fertility Rate adalah dengan treb angka yang menurun. Karena jika angka kelahiran menurun, maka Program Keluarga Berencana dianggap berhasil. Angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalamsatu juta wanita 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama usia suburnya. Adapun empat program yang dapat mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut adalah :

1. **Program Pengendalian Penduduk**

   Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peseta KB Aktif dengan taget kinerja pada tahun 2021 sebesar 66,23%. Program keluarga Berencana memiliki enam kegiatan yang empat kegiatannya bersumber dari dana DAU dan dua kegiatannya bersumber dari Dana DAK. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Untuk menunjang program keluarga berencana memiliki enam kegiatan, adapun kegiatan tersebut adalah:

   1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

      Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK), Sub kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan serta sub kegiatan Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendididkan formal.

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota didukung oleh lima sub kegiatan, dimana kelima sub kegiatan ini yang akan mendukung tercapaianya indikator kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

1. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integritas Program KKBPK disektor lain.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga.
3. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
4. Pengelolaan dan peleporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
5. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) memiliki 4 (empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut ada berasala Dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

   Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal memiliki lima sub kegiatan yang menunjang tercapaianya capaian kinerja pada kegiatan tersebut. Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

   1) Advokasi program KKBPK kepada Steakholders dan mitra kerja.
   2) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang.
   3) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Mimilok).

4) Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK.
5) Pengendalian Program KKBPK.

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

   Kegiatan Pendagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) didukung oleh satu sub kegiatan, dimana sub kegiatan tersebut di akomodir oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP).

3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota didukung oleh empat sub kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun keempat sub kegiatan tersebut adalah:

   1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontarsepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
   2) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
   3) Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
   4) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

   Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan dalam menunjang

tercapaianya capaian kinerja program kegiatan. Adapun ketiga sub kegiatan tersebut adalah :

1) Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
2) Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
3) Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Adapun dua kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh lima sub kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja program kegitan tersbut, dimana program kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung terhadap program penurunan Stunting. Dimana kegiatan ini didukung oleh lima sub kegiatan untuk dapat menunjang tercapainya target kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah:

   1) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
   2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
   3) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanandan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).

4) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
5) Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).

   Adapun table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau sebagai berikut:

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINSOSP3AKB TW II TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Fisik				Target dan Realisasi Keuangan			Permasalahan dan Kendala	Rencana Tindak Lanjut
							Target 2025	Target 2026	Realisasi 2026 TW I	(%)	Pagu 2026	Realisasi 2026 TW I	(%)		
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU						-	**3.791.309.372,00**	**25,16**		
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						**15.066.884.053,05**	**3.258.496.629,00**			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**100%**	**100%**			**6.781.498.514,70**	**2.966.869.870,00**			
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**			**27.089.703,00**	-	0,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		4.738.257,00	-	0,00		
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.824.728,00	-	0,00		
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-		2.861.080,50	-	0,00		
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.879.616,50	-	0,00		
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-		4.005.248,50	-	0,00		
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	-		4.529.805,50	-	0,00		

						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4.250.967,00	-	0,00		
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**			**6.121.002.498,60**	**2.842.608.982,00**	46,44		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	28 Orang	28 Orang	55,80 %	3.913.861.470,00	1.925.868.425,00	49,21		
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	41,87 %	2.026.191.480,00	848.280.557,00	41,87		
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,08 %	151.868.492,10	68.460.000,00	45,08		
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	10.037.952,00	-	0,00		
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	2.961.979,50	-	0,00		
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	10.109.214,00	-	0,00		
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	4.426.569,00	-	0,00		
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	1.545.342,00	-	0,00		
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**		**13.459.870,00**	**2.400.000,00**	17,83		
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2.041.623,00	-	0,00		

1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	6.253.057,00	-	0,00		
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50%	5.165.190,00	2.400.000,00	46,46		
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**			**20.518.356,00**	**-**	0,00		
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	1 Dok	0%	5.195.127,45	-	0,00		
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	1 Dok	0%	5.948.850,75	-	0,00		
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	-	-	5.278.588,80	-	0,00		
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	0%	4.095.789,00	-	0,00		
1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**10 Jenis**	**10 Jenis**			**173.205.786,85**	**43.080.693,00**	24,87		
1	06	01	2.06	0001	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	2 paket	16,66 %	5.937.945,00	-	0,00		
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	33,33 %	24.902.850,00	-	0,00		
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	4 Paket	50%	26.537.547,00	-	0,00		
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1095 Dokumen	92 Dokumen	41,64 %	6.603.489,90	2.750.000,00	41,64		
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	35,25 %	24.312.200,00	8.570.520,00	35,25		
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	0,00%	1.298.700,00	-	0,00		
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	41,97 %	75.666.065,00	31.760.173,00	41,97		

1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	-	4.724.421,30	-	0,00		
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	3.222.568,65	-	0,00		
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun**	**13 Unit**	**13 Unit**			**-**	**-**	#DIV/0!		
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional/lapangan yang disediakan	**-**	**-**					-		
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	9 unit	-		-	-			
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	-	-	#DIV/0!		
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**			**257.511.010,25**	**70.084.295,00**	27,22		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	256 Laporan	20 Laporan	22,25 %	2.472.000,00	550.000,00	22,25		
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	22,01 %	200.081.285,00	44.034.295,00	22,01		
1	06	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	46,40 %	54.957.725,25	25.500.000,00	46,40		
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**41 Unit**	**41 Unit**			**168.711.290,00**	**8.695.900,00**	5,15		
1	06	01	2.09	0001	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	3 Unit	6,71 %	129.607.490,00	8.695.900,00	6,71		
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	10 Unit	0%	9.600.000,00	-	0,00		
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1 Unit	0,00%	29.503.800,00	-	0,00		

					URUSAN SOSIAL				-	-	**2.992.420.758,35**	**291.626.759,00**	9,75	-	-
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**18.671.942,40**	**-**	0,00		
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	**Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**	**100%**	**100%**	**18.671.942,40**	-	0,00		
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan dan Retorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	100 Orang	4 Orang	0,00%	18.671.942,40	-	0,00		
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	-	-	**15.032.185,00**	**11.012.826,00**	73,26	-	-
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**	**Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			**15.032.185,00**	**11.012.826,00**	73,26		
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	200 Orang	60 Orang	73,26 %	15.032.185,00	11.012.826,00	73,26		
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Yang tertangani**	-	-	-	-	**2.131.949.336,15**	**131.277.148,00**	6,16	-	-
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS yang tertangani**	-	-			**2.131.949.336,15**	**131.277.148,00**	6,16		

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	250 orang	-		943.500,00	-			
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/kota	36 orang	36 orang	-		-	-			
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	7 orang	7 orang	100%	506.160,00	506.160,00	100,00		
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	120 orang	2 Orang	100%	520.000,00	520.000,00	100,00		
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	-	60,63 %	5.080.000,00	3.080.000,00	60,63		
1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 orang	1.000 orang	-	0,29 %	1.870.003.579,05	5.355.000,00	0,29		
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	141 Orang	10 Orang	100%	555.000,00	555.000,00	100,00		
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 orang	40 orang	10 Orang	100%	442.890,00	442.890,00	100,00		
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	520.000,00	520.000,00	100,00		
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	20 Orang	20 Orang	2 Orang	31,85 %	2.964.055,00	944.055,00	31,85		

						kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	370 Orang	32 Orang	47,56 %	249.944.067,10	118.883.958,00	47,56		
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kpendudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00 %	470.085,00	470.085,00	100,00		
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat**	**90%**	**90%**	-	-	**568.512.866,20**	**144.155.030,00**	25,36	-	-
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**	**628 Orang**	**628 Orang**			**181.023.165,00**	**117.101.170,00**	64,69		
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	-	-	520.000,00	-	0,00		
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	-	-	496.170,00	496.170,00	100,00		
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	608 Orang	-		180.006.995,00	116.605.000,00	64,78		
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**387.489.701,20**	**27.053.860,00**	6,98		
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	150000 Orang	30.000 orang	15,37 %	112.948.505,00	20.623.860,00	18,26		
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	-		24.168.425,00	-	0,00		
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20 Orang	20 Orang	58.795 Keluarga	46,86 %	236.123.279,00	2.500.000,00	1,06		

						Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1000 Usulan	1000 Usulan	4.900 keluarga	9,80%	14.249.492,20	3.930.000,00	27,58		
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan**	**100 %**	**100 %**	-	-		-		-	-
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan**	**300 Orang**	**300 Orang**			**41.915.806,40**	**5.181.755,00**	12,36		
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	39.978.923,00	4.715.555,00	11,80		
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	524.364,00	466.200,00	88,91		
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	499.500,00	-	0,00		
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	418.914,00	-	0,00		
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	494.105,40	-	0,00		
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**100%**	**100%**	-	-	**216.338.622,20**	**-**	0,00	-	-
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**	**3 TMP**	**3 TMP**			**216.338.622,20**	**-**	0,00		

1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	1 TMP	33,33 %	216.338.622,20	-	0,00		
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				-	-	**1.714.131.702,80**	**532.812.743,00**	31,08	-	-
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**100%**	**100%**	-	-	**1.495.463.657,03**	**505.522.743,00**	33,80	-	-
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**	**40 Orang**	**40 Orang**			**21.773.920,30**	**8.110.361,00**	37,25		
2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	28 Lembaga	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	21.773.920,30	8.110.361,00	37,25		
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**			**43.750.459,38**	**2.600.000,00**	5,94		
2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	3 Lembaga	3 Lembaga	-		21.875.360,47	2.600.000,00	11,89		
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan	80 Orang	80 Orang	-		21.875.098,91	-	0,00		

					Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi									
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**			**1.429.939.277,35**	**494.812.382,00**	34,60		
2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	-		1.388.108.644,25	491.251.447,00	35,39		
2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 Dokumen	2 Dokumen			24.255.237,30	2.080.195,00	8,58		
2	08	02	2.03	0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			17.575.395,80	1.480.740,00	8,43		
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**	**100%**	**100%**	-	-	**43.669.120,02**	**17.780.000,00**	40,72	-	-
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**	6 Lembaga	6 Lembaga			**21.847.213,02**	**5.910.000,00**	27,05		
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	6 Lembaga	6 Lembaga	-		21.847.213,02	5.910.000,00	27,05		

					Kewenangan Kabupaten/Kota	provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota									
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani**	25 Orang	25 Orang			**21.821.907,00**	**11.870.000,00**	54,39		
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	6 Orang	24%	21.821.907,00	11.870.000,00	54,39		
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**100 %**	**100 %**	-	-	**54.997.064,00**	**-**	0,00	-	-
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun**			-	-	**-**	**-**	-	-	-
2	**08**	**04**	**2.01**	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya**	**Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluargayang mendapat peningkatan**			-	-	**54.997.064,00**	**-**	0,00	-	-

					dalam Daerah Kabupaten/Kota	**kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun**									
2	08	04	2.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	**Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	-	-	22.627.756,00	-	0,00	-	-
2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang			32.369.308,00	-	0,00		
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**	**100 %**	**100 %**	-	-	**44.999.941,15**	**1.200.000,00**	2,67	-	-
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**	2 Dokumen	2 Dokumen			**44.999.941,15**	**1.200.000,00**	2,67		
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	44.999.941,15	1.200.000,00	2,67		
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**	**70%**	**70%**	-	-	**50.750.670,60**	**8.310.000,00**	16,37	-	-
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**	**33 Lembaga**	**33 Lembaga**			50.750.670,60	**8.310.000,00**	16,37		
2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			50.750.670,60	8.310.000,00	16,37		

2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kasus kekerasan anak tertangani**	**100%**	**100%**	-	-	**24.251.250,00**	-	0,00	-	-
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**24.251.250,00**	-	0,00		
2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-		
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	24.251.250,00	-	0,00		
2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-			-		
													-		
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				-	-	**3.578.833.077,20**	-	0,00	-	-
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.22 point**	**2.22 point**	-	-	**164.863.712,90**	-	0,00	-	-
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**16.663.712,90**	-	0,00		

2	14	02	2.01	0025	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			8.403.024,40	-	0,00		
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan			8.260.688,50	-	0,00		
2	14	02	2.01	0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2 Kabupaten	2 Kabupaten			-	-	-		
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**148.200.000,00**	**-**	0,00		
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	-	-		
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan danpengumpulan data keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			101.400.000,00	-	0,00		
2	14	02	2.01	0013	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen			46.800.000,00	-	0,00		
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**	**71,23%**	**71,23%**	-	-	**766.000.450,00**	**-**	0,00	-	-
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**			**281.665.450,00**	-	0,00		

2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-			-	-	-		
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan			225.000.000,00	-	0,00		
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan			-	-	0,00		
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			16.665.450,00	-	0,00		
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen			40.000.000,00	-	0,00		
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kader IMP yang dibina**	**15 Orang**	**15 Orang**			**76.050.000,00**		0,00		
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	15 Orang	-	-	76.050.000,00	-	0,00		
2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	1 Laporan	1 Laporan			-	-	-		

						Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**	**33 faskes**	**33 faskes**			**408.285.000,00**	**-**	0,00		
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan			35.100.000,00	-	0,00		
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	12.709 Orang			373.185.000,00	-	0,00		
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan			-		0,00		
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**			**-**	**-**	0,00		
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung KB	15 Kampung KB			-	-	0,00		
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**	**71,04%**	**71,04%**	-	-	**2.647.968.914,30**	-	0,00	-	-

2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan**	**12 Kelompok**	**12 Kelompok**			**67.368.971,30**	**-**	0,00		
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan			16.668.971,30	-	0,00		
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	40 Kelompok	40 Kelompok			50.700.000,00	-	0,00		
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**	**60 Orang**	**60 Orang**			**2.580.599.943,00**	**-**	0,00		
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Laporan	1173 Laporan			2.580.599.943,00	-	0,00		

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bidang Sosial merupakan bagian dari Enam urusan wajib pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 khusus untuk bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampuh SPM, sudah mengakomodir seluruh sub kegiatan yang ada pada Permendagri 84 Tahun 2022, hal ini bertujuan agar pencapaian SPM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan target capaian kinerja yang ada pada SPM Bidang sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dimana capaian pelaporan SPM rutin dilakukan secara Triwulan kepada Bangda Kemendagri.

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 2.2 Terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB
Kabupaten Sanggau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi			Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;		96,9	97	97,45	97,75	69,06	69,06	87,86	97,45	97,75	97,75	
		Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,00	97,45	97,75	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	80,75	97,45	97,75	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis luar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	98,00	97,45	97,75	97,75	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	100	97,45	97,75	97,75	
2	Persentase PPKS yang mandiri	%		25,00	25,00	26,50	26,50	25,39	25,39	25,39	25,60	25,60	25,60	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%		61,54	61,42	61,54	61,65	71,28	73,86	73,86	61,54	61,65	61,65	
4	Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	-	Madya	Madya	Madya	
5	Total Fertility Rate	Point		2.22	2.23	2.22	2.21	2,18	2,21	2,21	2.22	2.21	2.21	
6	Nilai AKIP Dinsosp3akb	%		60,00	65,00	68,00	69,00	69,50	69,72	69,50	69,50	69,50	69,50	

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam menentukan isu-isu strategis serta permasalahan dalam dua tahun kedepan yaitu tahun 2025-2026.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Sosial**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan
d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
e. Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak

3. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
e. Belum Optimalnya system pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk.

2.4. Review Terhadap Renja Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2026 terdapat 16 (Enam Belas) Program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan dan 110 (Seratus Sepuluh Sub Kegiatan) terdapat perubahan kodesifikasi dan Nomenklatur dalam penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Kepemandagri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penganggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki beberapa sumber dana yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, DAU SG dan DBH CHT.

Daftar table Review terhadap RKPD Terlampir :

Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2026

Kode					Urusan /Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026										Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah (sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah (sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												**15.066.884.053**	**17,202,417,194.61**	Sumber Dana	
1	06				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL												**9.773.919.273**	**10.911.920.394**		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												**6.781.498.515**	**7.652.791.202**		
1	06	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**27.089.703**	**27.089.703**		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sebanyak 3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	2 Dokumen	100%	100%	4.738.257	4.738.257	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	01	2.01	00002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	1 Dokumen	100%	100%	2.824.728	2.824.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	00003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	1 Dokumen	100%	100%	2.861.081	2.861.081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	00004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	1 Dokumen	100%	100%	3.879.617	3.879.617	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	00005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen PerubahanDPA SKPD yang DisusunSebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	1 Dokumen	100%	100%	4.005.249	4.005.249	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	00006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	2 Laporan	100%	100%	4.529.806	4.529.806	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dok	4 Laporan	100%	100%	4.250.967	4.250.967	Dana Transfer Umum-	

							Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	Perangkat Daerah											Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**												**6.121.002.499**	**6.226.535.962**		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Orang	Orang/ Bulan	100%	100%	3.913.861.470	3.913.861.569	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN		Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	2.026.191.480	2.131.724.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	151.868.492	151.868.492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	10.037.952	10.037.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Laporan	100%	100%	2.961.980	2.961.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	10.109.214	10.109.214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Laporan	100%	100%	4.426.569	4.426.569	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Keuangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	1.545.342	1.545.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**												**13.459.870**	**13.459.870**		
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	2.041.623	2.041.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	6.253.057	6.253.057	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Laporan	100%	100%	5.165.190	5.165.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												**20.518.356**	**20.518.356**		
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	5.195.127	5.195.127	Dana Transfer Umum-Dana	

																		Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	5.948.851	5.948.851	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	5.278.589	5.278.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	100%	100%	4.095.789	4.095.789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**												**173.205.787**	**215.980.647**		
1	06	01	2.06	0001	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Paket	100%	100%	5.937.945	5.937.945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Paket	100%	100%	24.902.850	24.902.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Paket	100%	100%	26.537.547	34.089.321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Persentase Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	6.603.490	6.603.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan/Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Paket	100%	100%	24.312.200	37.243.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	1.298.700	1.298.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	OH	Laporan	100%	100%	75.666.065	96.311.655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	4.724.421	6.370.167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	3.222.569	3.222.569	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												-	**58.914.304**		
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100%	100%	-			
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Paket	Unit	100%	100%	-	21.523.399	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100%	100%	-	37.390.905		
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**257.511.010**	**309.752.870**		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Laporan	100%	100%	2.472.000	2.472.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Laporan	100%	100%	200.081.285	200.081.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Jenis	Laporan	100%	100%	54.957.725	107.199.585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan Gaji Tenaga Alih Daya sebanyak 2 orang Selama 6 Bulan Rp. 51.862.746,-
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**												**168.711.290**	**780.539.490**		
1	06	01	2.09	0002	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Unit	Unit	100%	100%	129.607.490	97.939.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Unit	Unit	100%	100%	9.600.000	9.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.09	00 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Unit	Unit	100%	100%	29.503.800	673.000.000		Penambahan anggaran untuk pembangunan Shelter ODGJ& PPPA, Gedung Kantor dan Gedung BLK
					URUSAN SOSIAL												**2.992.420.758**	**3.259.129.192**		
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**											**18.671.942**	**24.571.942**		
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**			Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan		100%	100 %					**18.671.942**	**24.571.942**		
1	06	02	2.03	00 11	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan dan Retorasi Sosial		Terpenuhinya Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan Pengenala, Penanaman dan Penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisa, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Meningkatnya Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan Pengenala, Penanaman dan Penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisa, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	18.671.942	24.571.942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi**											**15.032.185**	**15.032.185**		
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**												**15.032.185**	**15.032.185**		
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemulangan warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Orang	100%	100%	15.032.185	15.032.185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**												**2.131.949.336**	**2.344.755.960**		
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**												**2.131.949.336**	**2.344.755.960**		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan		Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Lansia	Orang	100%	100%	943.500	943.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

								Kabupaten/Kota										
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	506.160	100.293.171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	520.000	520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	5.080.000	5.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat		Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Orang	100%	100%	1.870.003.579	1.875.015.401	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

								dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	555.000	555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	442.890	442.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	520.000	520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	2.964.055	2.964.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Penyandang Disabilitas/ODGJ yang tertangani	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Orang	100%	100%	249.944.067	357.951.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan Anggaran Sebesar Rp. 120.000.000,- Untuk Pembayaran Hutang Rawat Inap RSJ.
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kpendudukan		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan	50 Orang	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100%	100%	470.085	470.085		

					bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota										
1	**06**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**												**568.512.866**	**613.431.852**		
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**											**181.023.165**	**186.007.237**		
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar		Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	520.000	520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar		Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	496.170	496.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar		Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Panti Asuhan	Orang	100%	100%	180.006.995	184.991.067	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**												**387.489.701**	**427.424.615**		
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Dokumen Data Miskin Kabupaten Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	150.000 Orang	150.000 Orang	100%	100%	112.948.505	141.729.465	Dana Transfer Umum-Dana	

																			Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Kabupaten Sanggau	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100%	100%	24.168.425	17.668.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terpenuhinya Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	145.985 Keluarga	145.985 Keluarga	100%	100%	236.123.279	254.717.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100%	100%	14.249.492	13.309.492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan**											**41.915.806**	**42.110.631**		
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan**											**41.915.806**	**42.110.631**		
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	39.978.923	34.650.063	Dana Transfer Umum-Dana	

							makanan yang disediakan	Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota											Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	00 02	Penyediaan Sandang		Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	524.364	6.048.049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	499.500	499.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	418.914	418.914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	00 07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100 %	100 %	Orang	Orang	100%	100%	494.105	494.105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**											**216.338.622**	**219.226.622**		
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**												**216.338.622**	**219.226.622**		

1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Pemeliharaan TMP Kab. Sanggau	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Kec	100 %	100 %	Makam	Makam	100%	100%	216.338.622	219.226.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												**1.714.131.703**	**2.713.662.567**		
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**											**1.495.463.657**	**2.499.060.117**		
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**											**21.773.920**	**20.968.920**		
2	08	02	2.01	0013	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Pertemuan Penyusunan Indikator APE	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Pertemuan	Perangkat Daerah	100%	100%	21.773.920	20.968.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial**												**43.750.459**	**43.250.704**		

					dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota															
2	08	02	2.02	05	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi		Jumlah Kaum Perempuan yang mengikuti pendidikan sadar hukum dan politik	Jumlah Organisasi Masyarakat yang MendapatAdvokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan danPendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Orang	Organisasi	100%	100%	21.875.099	21.875.605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.02	08	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Peserta yang di bina	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Orang	Dokumen	100%	100%	21.875.360	21.375.099		
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**													**1.429.939.277**	**2.434.840.492**		
2	08	02	2.03	07	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang Di Bina	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Organisasi Perempuan	Lembaga	100%	100%	1.388.108.644	2.318.909.043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan Anggaran 3 Organisasi Wanita Sebesar Rp. 1.292.882.080 yaituPerempuan GOW Rp. 680.87

																				3.032, DWP Rp. 561.988.088 dan PISWAN Rp. 50.020.960,-
2	08	02	2.03	02	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pertemuan dan pembinaan dalam rangka kegiatan KSI	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	5 Kali Pembinaan	200 Orang	100%	100%	24.255.237	99.256.054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.03	09	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	2 kegiatan	Dokumen	100%	100%	17.575.396	16.675.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**											**43.669.120**	**43.149.120**		
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**												**21.847.213**	**21.327.213**		
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi,	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	Terlaksananya Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	100%	21.847.213	21.327.213		

							masyarakat, serta Kab/Kota	provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota											
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**												**21.821.907**	**21.821.907**		
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Kasus	Orang	100%	100%	21.821.907,00	21.821.907,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**												**54.997.064**	**62.679.900**		
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**												**54.997.064**	**62.679.900**		
2	08	05	2.02	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	40 Orang	1 Dok	100%	100%	22.627.756	24.271.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	05	2.02	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Terpenuhinya keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	100%	100%	32.369.308	38.408.788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**												**44.999.941**	**44.479.941**		
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**												**44.999.941**	**44.479.941**		
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	100%	100%	44.999.941	44.479.941	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**												**50.750.671**	**50.249.825**		
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**												**50.750.671**	**50.249.825**		
2	08	06	2.01	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	50.750.671	50.249.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**												**24.251.250**	**14.043.665**		
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**												**24.251.250**	**14.043.665**		
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100 %	100 %	Kader	Orang	100%	100%	24.251.250	14.043.665		
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												**3.578.833.077**	**3.576.833.021**		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**											**164.863.713**	**162.863.657**		
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**											**16.663.713**	**14.663.657**		
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan		Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah	Tersusunnya Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	8.403.024	6.402.968	Dana Transfer Umum-	

					Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		disusun Tingkat Kabupaten/Kota	disusun Tingkat Kabupaten/Kota	disusun Tingkat Kabupaten/Kota									Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Tersedianya Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	15 Kec	100 %	100 %	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%	100%	8.260.689	8.260.689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**													**148.200.000**	**148.200.000**		
2	14	02	2.01	0009	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	15 Kec	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	0012	Pencatatan danpengumpulan data keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	15 Kec	100 %	100 %	2 Laporan	2 Dok	100%	100%	101.400.000	101.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	0013	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 Kec	100 %	100 %	1 Laporan	2 Dok	100%	100%	46.800.000	46.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**											**766.000.450**	**766.000.450**		
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**		**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian**											**281.665.450**	**281.665.450**		

					Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		**Penduduk dan KB**													
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kec	100 %	100 %	Media	Dokumen	100%	100%	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	15 Kec	100 %	100 %	Desa	Laporan	100%	100%	16.665.450	16.665.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terpenuhinya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Laporan	100%	100%	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**												**76.050.000**	**76.050.000**		

2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Laporan Evaluasi Program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Kec	100 %	100 %	Paket	Orang	100%	100%	76.050.000	76.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**												**408.285.000**	**408.285.000**		
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		Jumlah Faskes, Jejaring dan Jejaringnya yang mendapat distribudi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Kec	100 %	100 %	Faskes	Laporan	100%	100%	35.100.000	35.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)		Jumlah Kesertaan Penggunaan MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15 Kec	100 %	100 %	Akseptor	Orang	100%	100%	373.185.000	373.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.		Jumlah Faskes yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Kec	100 %	100 %	Faskes	Laporan	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan**												**-**	**-**		

					tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB															
2	14	03	2.04	0001	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB		Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Peran Serta Ormasdan Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Organisasi	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tersedianya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Dokumen	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK	
2	14	03	2.04	0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Cakupan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kec	100 %	100 %	Dokumen	Kampung	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**											**2.647.968.914**	**2.647.968.914**		
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga**											**67.368.971**	**67.368.971**		

					ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**yang mendapatkan Pembinaan**														
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Kec	100 %	100 %	20 Unit	1 Lap	100%	100%	16.668.971	16.668.971	DAK	
2	14	04	2.01	0026	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Kec	100 %	100 %	20 Unit	1 Lap	100%	100%	50.700.000	50.700.000	DAK	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**										**2.580.599.943**	**2.580.599.943**		
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	Terpenuhinya Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	15 Kec	100 %	100 %	orang	1173 Lap	100%	100%	2.580.599.943	2.580.599.943	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)		Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan											

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2026 terdapat 16 (Enam Belas) Program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan dan 114 (Seratus Empat Belas Sub Kegiatan).

Dari Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat kecamatan untuk tahun 2025 terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) RTLH yang diusulkan oleh beberapa kecamatan dan yang telah berhasil di Verifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diusulkan untuk tahun 2025. Selain usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan oleh Masyarakat ada juga beberapa program kegiatan lain yang diusulkan terkait sosialisasi mengenai peningkatan Kapasitas Perempuan terhadap Pembangunan, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mulai dari pelaporan hingga rujukan ODGJ menggunakan BPJS untuk dapat di antarkan ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang untuk di lakukan Rehabilitasi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sanggau	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	

2.	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kabupaten Sanggau	370 Orang	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

TABEL. III.I

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja								Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Perubahan	Bertambah /Berkurang (+/-)
										Capaian Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				
												Tolak Ukur		Target						
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolak Ukur	Target			
2					3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13
																		15.066.884.053	**17,202,417,194.61**	**2.135.531.930**
				1	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**													**9.773.919.273**	**10.911.920.394**	**1.138.001.121**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinsosp3akab Kab. Sanggau								**6.781.498.515**	**7.652.791.202**	**871.292.687**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								**27.089.703**	**27.089.703**	**-**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.738.257	4.738.257	-
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang	100 %	2.824.728	2.824.728	-

																Disusun Sebanyak 1 Dokumen				
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	100 %	2.861.081	2.861.081	-
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	100 %	3.879.617	3.879.617	-
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	100 %	4.005.249	4.005.249	-
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	100 %	4.529.806	4.529.806	-
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	4 Dok	4 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	100 %	4.250.967	4.250.967	-

1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**													**6.121.002.499**	**6.226.535.962**	**105.533.463**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	100 %	3.913.861.470	3.913.861.569	99
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN							Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	100 %	2.026.191.480	2.131.724.844	105.533.364
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	100 %	151.868.492	151.868.492	-
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD							Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase Laporan Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	10.037.952	10.037.952	-
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	100 %	2.961.980	2.961.980	-
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak	100 %	10.109.214	10.109.214	-

												n yang disusun	n yang disusun			Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun				
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	100 %	4.426.569	4.426.569	-
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	100 %	1.545.342	1.545.342	-
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**					**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**								**13.459.870**	**13.459.870**	**-**
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	2.041.623	2.041.623	-
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	100 %	6.253.057	6.253.057	-
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	5.165.190	5.165.190	-

																yang disusun				
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur**								**20.518.356**	**20.518.356**	**-**
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	100 %	5.195.127	5.195.127	-
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian							Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	100 %	5.948.851	5.948.851	-
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	100 %	5.278.589	5.278.589	-
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan							Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	Terpenuhinya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	4.095.789	4.095.789	-
1	**06**	**01**	**2.06**	**0**	**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**													**173.205.787**	**215.980.647**	**42.774.860**
1	06	01	2.06	0001	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	100 %	5.937.945	5.937.945	-

1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	24.902.850	24.902.850	-
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Jumlah barang cetak dan pengganda an yang disediakan	Jumlah barang cetak dan pengganda an yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah barang cetak dan pengganda an yang disediakan	100 %	26.537.547	34.089.321	7.551.774
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3352 Eksemplar	3352 Eksemplar	Persentase pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	6.603.490	6.603.490	0
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material							Jumlah BBM yang disediakan	Jumlah BBM yang disediakan	4688 Liter	4688 Liter	Persentase pemenuhan Jumlah BBM yang disediakan	100 %	24.312.200	37.243.950	12.931.750
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan tamu	100 %	1.298.700	1.298.700	-
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	20 OK	24 OH	Persentase pemenuhan Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	100 %	75.666.065	96.311.655	20.645.590
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	5 Dok	5 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	100 %	4.724.421	6.370.167	1.645.746
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 Dok	2 Dok	Terlaksanan ya Sistem Pemerintah an Berbasis	100 %	3.222.569	3.222.569	0

					Elektronik pada SKPD							Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Elektronik pada SKPD				
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah Mebel yang diadakan								-	58.914.304	58.914.304
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah Pengadaan Kendaraa Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraa Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Persentase pemenuhan Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	-	-	-
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							Jumlah Unit Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Mabel	3 Unit	3 Unit	Persentase pemenuhan Jumlah Mebeleur yang diadakan	100 %	-	21.523.399	21.523.399
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Jumlah Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	101 %	-	37.390.905	37.390.905
1	**06**	**01**	**2.08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat**								**257.511.010**	**309.752.870**	**52.241.860**
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	256 Lembar	256 Lembar	Persentase pemenuhan Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	100 %	2.472.000	2.472.000	-
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber	Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah waktu penyediaan Jasa	100 %	200.081.285	200.081.285	-

												daya air dan listrik	daya air dan listrik			komunikasi, sumber daya air dan listrik				
1	06	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	26 Jenis	26 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	100 %	54.957.725	107.199.585	52.241.860
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**					**Jumlah kendaraan dinas perorangan/kendaaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar perizinannya**								168.711.290	780.539.490	**611.828.200**
1	06	01	2.09	0002	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas							Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	10 Unit	10 Unit	Persentase pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	100 %	129.607.490	97.939.490	-31.668.000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya							Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	94 Unit	Persentase pemenuhan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100 %	9.600.000	9.600.000	-
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Persentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	29.503.800	673.000.000	643.496.200
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															**-**
1	**06**	**02**			**URUSAN SOSIAL**	**pemberdayaan Penyandang**	**Menurunnya Penyandang**											**2.992.420.758**	**3.259.129.192**	**266.708.434**

						Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**													
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**					**Persentase PMKS yang tertangani**								**18.671.942**	**24.571.942**	**5.900.000**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**					**Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**								**18.671.942**	**24.571.942**	**5.900.000**
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan dan Retorasi Sosial							Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Meningkatnya Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan Pengenala, Penanaman dan Penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisa, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.	150 Orang	150 Orang	Persentase orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan, penananman dan Penghayatan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.	100 %	18.671.942	24.571.942	5.900.000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan**								**15.032.185**	**15.032.185**	**-**
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk**					**Jumlah Warga Negara Migran yang di Fasilitasi**	2000 Org							**15.032.185**	**15.032.185**	**-**

					dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal															
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal							Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	100 %	15.032.185	15.032.185	-
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**								**2.131.949.336**	**2.344.755.960**	**212.806.624**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**					**Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi.**								**2.131.949.336**	**2.344.755.960**	**212.806.624**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	292 Lansia	425 Lansia	Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	943.500	943.500	-
1	06	04	2.01	00	Penyediaan Sandang							Jumlah Orang yang Menerima	Jumlah Orang yang Menerima	12 Orang	12 Orang	Terpenuhinya Orang yang	100 %	-	-	-

				02								Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota			Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	506.160	100.293.171	99.787.011
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	20 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	520.000	520.000	-
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	50 Orang	50 Orang	Persentase Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	100 %	5.080.000	5.080.000	-

												Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota			Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat							Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	1 Dok	500 Orang	Persentase pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	100 %	1.870.003.579	1.875.015.401	5.011.822
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	15 Orang	Persentase Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	555.000	555.000	-
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	20 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	442.890	442.890	-
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	520.000	520.000	-
1	06	04	2.01	00	Pemberian Pelayanan							Jumlah Orang yang Mendapatka	Jumlah Orang yang Mendapatka	10 Orang	10 Orang	Persentase Orang yang Mendapatka	100 %	2.964.055	2.964.055	-

				11	Penelusuran Keluarga							n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota			n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	370 Org	370 Org	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	249.944.067	357.951.858	108.007.791
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kpendudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Org	50 Org	Terpenuhinya Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlanatar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabuapten/ Kota	100 %	470.085	470.085	-
1	**06**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya**								**568.512.866**	**613.431.852**	**44.918.986**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**					**Jumlah Panti Asuhan yang di Bina dalam Menyediakan Pelayanan**								**181.023.165**	**186.007.237**	**4.984.072**

										Kesejahteraan Sosial										
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar							Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	520.000	520.000	-
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar							Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	15 Orang	Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	496.170	496.170	-
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar							Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti/ LKSA	9 Panti/ LKSA	Terlaksanaanya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	180.006.995	184.991.067	4.984.072
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**					**Tersedianya Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang Disusun**								**387.489.701**	**427.424.615**	**39.934.914**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	100 %	112.948.505	141.729.465	28.780.960

1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	100 %	24.168.425	17.668.425	-6.500.000
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	Keluarga	Keluarga	Persentase pemenuhan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	100 %	236.123.279	254.717.233	18.593.954
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	6 KUBE	Persentase pemenuhan Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	100 %	14.249.492	13.309.492	-940.000
1	**06**	**06**	**0**	**0**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**Persentase korban bencana alam/non alam tertangani**	**100%**							**41.915.806**	**42.110.631**	**194.825**
1	**06**	**06**	**2.01**	**0**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**					**Persentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan.**	**100%**							**41.915.806**	**42.110.631**	**194.825**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan							Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	100 %	39.978.923	34.650.063	-5.328.860

												menerima makanan yang disediakan	menerima makanan yang disediakan			dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang							Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	524.364	6.048.049	5.523.685
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Unit	15 Unit	Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	499.500	499.500	-
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	418.914	418.914	-
1	06	06	2.01	00	Penyediaan Tempat							Jumlah Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Korban Bencana	100 %	494.105	494.105	-0

				07	Penampungan Pengungsi							yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota			yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan**								**216.338.622**	**219.226.622**	**2.888.000**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**					**Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan**								**216.338.622**	**219.226.622**	**2.888.000**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	3 TMP	3 TMP	Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	216.338.622	219.226.622	2.888.000
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															**-**
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak											**1.714.131.703**	**2.713.662.567**	**999.530.865**

2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**Tersedianya Data IPG dan IDG**								**1.495.463.657**	**2.499.060.117**	**1.003.596.460**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**					Tersedianya Data Pilah Gender dan Anak								**21.773.920**	**20.968.920**	**-805.000**
2	08	02	2.01	0013	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	40 orang	40 orang	Persentase pemenuhan Jumlah Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 %	21.773.920	20.968.920	-805.000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**					**Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak**								**43.750.459**	**43.250.704**	**-499.755**
2	08	02	2.02	05	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenanga	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenanga	1 Dok	1 Dok	Terlaksanaanya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	100 %	21.875.099	21.875.605	506

												n Kabupaten/ Kota	n Kabupaten/ Kota			Kabupaten/ Kota				
2	0 8	0 2	2. 0 2	0 8	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 Org	70 Org	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	21.875.360	21.375.099	- 500.262
2	**0 8**	**0 2**	**2. 0 3**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**					**Tersedianya Dokumen Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**								**1.429.939.277**	**2.434.840.492**	**1.004.901. 215**
2	0 8	0 2	2. 0 3	0 7	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	Persenbtase Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	100 %	1.388.108.644	2.318.909.043	930.800.3 99

2	08	02	2.03	02	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 orang	110 orang	Persentase Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 %	24.255.237	99.256.054	75.000.816
2	08	02	2.03	09	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 Dok	2 Dok	Persentase Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	100 %	17.575.396	16.675.396	-900.000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan**								**43.669.120**	**43.149.120**	**-520.000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**					**Jumlah Sosialisasi / Peretemuan Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapat Kekerasan dalam Rumah Tangga**								**21.847.213**	**21.327.213**	**-520.000**
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO							Jumlah Perangkat Daerah yang	Jumlah Perangkat Daerah yang	3 Perangkat	3 Perangkat	Persentase pemenuhan Jumlah Perangkat	100 %	21.847.213	21.327.213	**-520.000**

					kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota							mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Daerah	Daerah	Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**					**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani**								**21.821.907**	**21.821.907**	**-**
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapat layanan pengaduan	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Kasus	25 Kasus	Persentase pemenuhan Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapat layanan pengaduan	100 %	21.821.907	21.821.907	-
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**													**54.997.064**	**62.679.900**	**7.682.836**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**													**54.997.064**	**62.679.900**	**7.682.836**

2	08	05	2.02	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota							Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	Terpenuhinya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/ Kota	100 %	22.627.756	24.271.112	1.643.356
2	08	05	2.02	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota							Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/ Kota	150 Orang	150 Orang	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	32.369.308	38.408.788	6.039.480
																				-
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**													**44.999.941**	**44.479.941**	**-520.000**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**					Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun								**44.999.941**	**44.479.941**	**-520.000**
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian	100 %	44.999.941	44.479.941	-520.000

												yang disusun	yang disusun			data gender dan anak yang disusun				
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA**								**50.750.671**	**50.249.825**	**-500.846**
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**					**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**								**50.750.671**	**50.249.825**	**-500.846**
2	08	06	2.01	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	persentase kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	50.750.671	50.249.825	-500.846
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**Persentase Penanganan Kasus Anak yang tertangani**								**24.251.250**	**14.043.665**	**-10.207.585**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**					Jumlah Kader PATBM yang dibentuk								**24.251.250**	**14.043.665**	**-10.207.585**

2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	25 Orang	25 Orang	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	100 %	24.251.250	14.043.665	-10.207.585
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															**-**
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													**3.578.833.077**	**3.576.833.021**	**-2.000.056**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**													**164.863.713**	**162.863.657**	**-2.000.056**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**					**Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang disusun**								**16.663.713**	**14.663.657**	**-2.000.056**

2	14	02	2.01	0025	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	100 %	8.403.024	6.402.968	-2.000.056
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	Tersedianya dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	100 %	8.260.689	8.260.689	-
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**					**Jumlah Laporan Pengendalian Penduduk yang disusun**								**148.200.000**	**148.200.000**	**-**
2	14	02	2.01	0009	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100 %	-	-	-
2	14	02	2.01	0012	Pencatatan danpengumpulan data keluarga							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		Tersedianya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		101.400.000	101.400.000	-

2	14	02	2.01	0013	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun	Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun	2 Dok	2 Dok	Terlaksanaanya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100 %	46.800.000	46.800.000	-
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif**								**766.000.450**	**766.000.450**	**-**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**					**Jumlah Sosialisasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB.**								**281.665.450**	**281.665.450**	**-**
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Media	1 Dok	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100 %	225.000.000	225.000.000	-
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangu	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangu	Desa	Laporan	Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangu		16.665.450	16.665.450	-

					serta Media luar Ruang							nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dokumen	Laporan	Terpenuhinya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 %	40.000.000	40.000.000	-
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**					**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang mendapat sarana Pendukung Operasional**								**76.050.000**	**76.050.000**	**-**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)							Jumlah Kader Penggerakan IMP	Jumlah Kader Penggerakan IMP	15 Org Kader	15 Org Kader	Persentase pemenuhan Jumlah Kader Penggerakan IMP	100 %	76.050.000	76.050.000	-
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**					**Jumlah Faskes yang mendapat Pendistribusian Kebutuhan**	**33 Faskes**							**408.285.000**	**408.285.000**	**-**

					serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					**Alat dan Obat Kontrasepsi**										
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya							Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	100 %	35.100.000	35.100.000	-
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)							Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	12.709 Orang	12.709 Orang	Persentase pemenuhan Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	100 %	373.185.000	373.185.000	-
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.							Jumlah Faskes yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 %	-	-	-
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan**					**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam**								-	-	-

					pembinaan kesertaan ber KB					**pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**									
2	14	03	2.04	0001	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisai	3 Organisai	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	-	-	-
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dok	2 Dok	Tersedianya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100 %	-	-	-
2	14	03	2.04	0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB							Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	32 Kampung KB	32 Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100 %	-	-	-

2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**								**2.647.968.914**	**2.647.968.914**	**-0**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**					**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat pembinaan**								**67.368.971**	**67.368.971**	**-0**
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	1 Lap	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 %	16.668.971	16.668.971	-0
2	14	04	2.01	0026	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusian serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusian serta	7 Kelompok	12 Klmpk	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusian serta	100 %	50.700.000	50.700.000	-

												Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**					**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**								**2.580.599.943**	**2.580.599.943**	**-**
2	**14**	**04**	**2.02**	**0006**	**Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)**							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	orang	1173 Lap	Terpenuhinya Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	100 %	**2.580.599.943**	**2.580.599.943**	**-**

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
        g. Evaluasi Kinerja Perangkat Derah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD
        d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
        e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
        f. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
        g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
        h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        a. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD
        b. Pengamanan Barang milik daerah
        c. Penatausahaan barang milik Daerah
    4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
        b. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
        c. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
        d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
        b. Penyediaan peralatan dan perlengkapankan kantor

c. Penyediaan bahan logistic kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan bahan/materian
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
i. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan kendaraan Dinasoperasional dan lapangan
b. Pengadaan Mebel

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
c. Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial
1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota
a. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
b. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
1) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/keluarahan asal.
a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

4. Program Rehabilitasi Sosial
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
a. Penyediaan permakanan
b. Penyediaan sandang
c. Penyediaan alat bantu
d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

e. Pemberianbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
g. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak.
h. Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar.
i. Pemberian layanan data dan pengaduan
j. Pemberian layanan kedaruratan
k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
l. Pemberian layanan rujukan.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
      a. Penjangkauan anak-anak terlantar
      b. Rujukan anak-anak terlantar
      c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
   2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      a. Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
      c. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
      d. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Program Penangan Bencana
   1) Perlindungan sosial korban bencana alam sosial Kabupaten/Kota
      a. Penyediaan Makanan
      b. Penyediaan sandang
      c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
      d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
      e. Pelayanan dukungan psikososial
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
   1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelakasanaan PUG termasuk PPRG
   2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
a. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

9. Program Perlindungan Perempuan
1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan haka nak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
1) Pengumpulan pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

12. Program Pemenuhan Hak Anak
1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten/kota.

2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
   a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.
   b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
   c. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.

13. Program Perlindungan Khusus Anak
   1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
      a. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota.
   2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
      a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
14. Program Pengendalian Penduduk
   1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
      a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota)
      b. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
      c. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.
   2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah Kabupaten/Kota.
      a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
      b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
      c. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
      d. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
      e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana.
15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
    a. Pengendalian program KKBPK
    b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
    c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
    d. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
    e. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Steakholder dan Mitra Kerja.
2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
    a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
    a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
    b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
    c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
    d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kebupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
    a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
    b. Integrasi pembanugnan lintas sector di Kampung KB
    c. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
    1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
        a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).
        b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor (UPPKA)) biaya operasional bagi pengelolaan dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)

c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /PPKS).
d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/PPKS)

2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga.\

a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOSP3AKB TAHUN 2026

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU				JUMLAH PAGU BARU (Rp)	JUMLAH KEGIATAN BARU
		RENJA 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	APBD 2026	PENYEMPURNAAN APBD 2026	PERUBAHAN RENJA 2026 (Rp)		
1	2	3			4			5				6	7
1	URUSAN SOSIAL	7	7	7	16	16	16	9.773.919.273	9.773.919.273	9.773.919.273	10.911.920.394	1.138.001.121	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	5	11	11	11	1.714.131.703	1.714.131.703	1.714.131.703	2.713.662.567	999.530.865	
3	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURAGA BERENCANA	3	3	3	7	7	7	3.578.833.077	3.578.833.077	3.578.833.077	3.576.833.021	- 2.000.056	
	JUMLAH	15	15	15	34	34		15.066.884.053	15.066.884.053	15.066.884.053	17,202,417,194.61	2.135.531.930	

TABEL 3.3
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINSOSP3AKB KAB.SANGGAU TAHUN 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
							RENJA 2026	RENJA Perubahan 2026	RENJA 2026	RENJA Perubahan 2026	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.781.498.515**	**7.652.791.202**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**27.089.703**	**27.089.703**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	4.738.257	4.738.257	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1	1 Dok	1 Dok	2.824.728	2.824.728	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	1 Dok	1 Dok	2.861.081	2.861.081	
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	3.879.617	3.879.617	
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	4.005.249	4.005.249	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	4.529.806	4.529.806	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	4 Dok	4 Dok	4.250.967	4.250.967	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**				**6.121.002.499**	**6.226.535.962**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.913.861.470	3.913.861.569	
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	2.026.191.480	2.131.724.844	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	151.868.492	151.868.492	

1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	10.037.952	10.037.952	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dok	1 Dok	2.961.980	2.961.980	
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	10.109.214	10.109.214	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	4.426.569	4.426.569	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dok	2 Dok	1.545.342	1.545.342	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**13.459.870**	**13.459.870**	
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	2.041.623	2.041.623	
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	6.253.057	6.253.057	
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	5.165.190	5.165.190	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**20.518.356**	**20.518.356**	
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dok	2 Dok	5.195.127	5.195.127	
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	2 Dok	2 Dok	5.948.851	5.948.851	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	1 Dok	1 Dok	5.278.589	5.278.589	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	4.095.789	4.095.789	
1	**06**	**01**	**2.06**	**0**	**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**				**173.205.787**	**215.980.647**	
1	06	01	2.06	0001	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5.937.945	5.937.945	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	24.902.850	24.902.850	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	26.537.547	34.089.321	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3352 Eksemplar	3352 Eksemplar	6.603.490	6.603.490	

1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah BBM yang disediakan	4688 Liter	4688 Liter	24.312.200	37.243.950	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	1.298.700	1.298.700	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	20 OK	24 OH	75.666.065	96.311.655	
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	5 Dok	5 Dok	4.724.421	6.370.167	
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	3.222.569	3.222.569	
1	06	01	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	58.914.304	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	0	-	-	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	21.523.399	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	-	37.390.905	
1	**06**	**01**	**2.08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**257.511.010**	**309.752.870**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	256 Lembar	256 Lembar	2.472.000	2.472.000	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	200.081.285	200.081.285	
1	06	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	26 Jenis	26 Jenis	54.957.725	107.199.585	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**				168.711.290	780.539.490	
1	06	01	2.09	0002	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	10 Unit	10 Unit	129.607.490	97.939.490	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	94 Unit	9.600.000	9.600.000	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	29.503.800	673.000.000	
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	**06**	**02**			**URUSAN SOSIAL**				**2.992.420.758**	**3.259.129.192**	

1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**				**18.671.942**	**24.571.942**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**				**18.671.942**	**24.571.942**	
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan dan Retorasi Sosial	Meningkatnya Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan Pengenala, Penanaman dan Penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisa, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.	150 Orang	150 Orang	18.671.942	24.571.942	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**				**15.032.185**	**15.032.185**	
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**				**15.032.185**	**15.032.185**	
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	1 Dok	1 Dok	15.032.185	15.032.185	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**2.131.949.336**	**2.344.755.960**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**				**2.131.949.336**	**2.344.755.960**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	292 Lansia	425 Lansia	943.500	943.500	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	-	-	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	506.160	100.293.171	

1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	520.000	520.000	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	5.080.000	5.080.000	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	1 Dok	500 Orang	1.870.003.579	1.875.015.401	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	555.000	555.000	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	442.890	442.890	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	520.000	520.000	
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	2.964.055	2.964.055	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Org	370 Org	249.944.067	357.951.858	
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kpendudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org	50 Org	470.085	470.085	
1	**06**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**568.512.866**	**613.431.852**	
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**				**181.023.165**	**186.007.237**	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang	10 Orang	10 Orang	520.000	520.000	

						dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	496.170	496.170	
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti/ LKSA	9 Panti/ LKSA	180.006.995	184.991.067	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**387.489.701**	**427.424.615**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	112.948.505	141.729.465	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	24.168.425	17.668.425	
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	Keluarga	Keluarga	236.123.279	254.717.233	
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	6 KUBE	14.249.492	13.309.492	
1	**06**	**06**	**0**	**0**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**41.915.806**	**42.110.631**	
1	**06**	**06**	**2.01**	**0**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**41.915.806**	**42.110.631**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	300 Orang	39.978.923	34.650.063	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	300 Orang	300 Orang	524.364	6.048.049	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	499.500	499.500	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	418.914	418.914	
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	494.105	494.105	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN**				**216.338.622**	**219.226.622**	

					TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**216.338.622**	**219.226.622**	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	3 TMP	3 TMP	216.338.622	219.226.622	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**1.714.131.703**	**2.713.662.567**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**1.495.463.657**	**2.499.060.117**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**				**21.773.920**	**20.968.920**	
2	08	02	2.01	0013	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	40 orang	40 orang	21.773.920	20.968.920	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**				**43.750.459**	**43.250.704**	
2	08	02	2.02	05	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	21.875.099	21.875.605	
2	08	02	2.02	08	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Org	70 Org	21.875.360	21.375.099	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan**				**1.429.939.277**	**2.434.840.492**	

					lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota						
2	08	02	2.03	07	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	1.388.108.644	2.318.909.043	
2	08	02	2.03	02	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 orang	110 orang	24.255.237	99.256.054	
2	08	02	2.03	09	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	2 Dok	17.575.396	16.675.396	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**43.669.120**	**43.149.120**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**				**21.847.213**	**21.327.213**	
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	21.847.213	21.327.213	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**21.821.907**	**21.821.907**	
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Kasus	25 Kasus	21.821.907	21.821.907	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**54.997.064**	**62.679.900**	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam**				**54.997.064**	**62.679.900**	

					Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	08	05	2.02	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	22.627.756	24.271.112	
2	08	05	2.02	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	32.369.308	38.408.788	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**44.999.941**	**44.479.941**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**				**44.999.941**	**44.479.941**	
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		2 Dok	2 Dok	44.999.941	44.479.941	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun			**50.750.671**	**50.249.825**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**				**50.750.671**	**50.249.825**	
2	08	06	2.01	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dok	1 Dok	50.750.671	50.249.825	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			**24.251.250**	**14.043.665**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**				**24.251.250**	**14.043.665**	

2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		25 Orang	25 Orang	24.251.250	14.043.665	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.578.833.077**	**3.576.833.021**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**164.863.713**	**162.863.657**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**16.663.713**	**14.663.657**	
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dok	1 Dok	8.403.024	6.402.968	
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	8.260.689	8.260.689	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal**			**148.200.000**	**148.200.000**	
2	14	02	2.01	0009	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		2 Laporan	1 Laporan	-	-	
2	14	02	2.01	0012	Pencatatan danpengumpulan data keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 Laporan		101.400.000	101.400.000	

						Sistem Informasi Keluarga					
2	14	02	2.01	0013	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Dok	2 Dok	46.800.000	46.800.000	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun			**766.000.450**	**766.000.450**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**				**281.665.450**	**281.665.450**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Media	1 Dok	225.000.000	225.000.000	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Desa	Laporan	16.665.450	16.665.450	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Laporan	40.000.000	40.000.000	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**			**76.050.000**	**76.050.000**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)		15 Org Kader	15 Org Kader	76.050.000	76.050.000	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kader Penggerakan IMP**			**408.285.000**	**408.285.000**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang		1 Laporan	1 Laporan	35.100.000	35.100.000	

					pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya						
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	12.709 Orang	12.709 Orang	373.185.000	373.185.000	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	-	-	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**			**-**	**-**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB		3 Organisai	3 Organisai	-	-	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Dok	2 Dok	-	-	
2	14	03	2.04	0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	32 Kampung KB	32 Kampung KB	-	-	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			**2.647.968.914**	**2.647.968.914**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**				**67.368.971**	**67.368.971**	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		20 Unit	1 Lap	16.668.971	16.668.971	

					(BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						
2	14	04	2.01	0026	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Kelompok	12 Klmpk	50.700.000	50.700.000	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)**			**2.580.599.943**	**2.580.599.943**	
2	**14**	**04**	**2.02**	**0006**	**Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)**	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	orang	1173 Lap	**2.580.599.943**	**2.580.599.943**	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, merupakan dokumen perencanan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2026. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sanggau secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara khusus maka Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2025–2026 2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan

berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan. 3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada jenjang telah ditetapkan. 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2026 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.